

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menerapkan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya jumlah PMI yang bekerja di Arab Saudi ditengah permasalahan yang menimpa PMI. Salah satu faktor munculnya permasalahan yang menimpa PMI disebabkan oleh pelaksanaan sistem *kafalah* di Arab Saudi yang bersifat eksploitatif. Melalui Program SPSK, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan program penempatan PMI di Arab Saudi yang terintegrasi secara *online* dan dengan tujuan agar lebih aman. Sebagai alat analisa, penelitian ini menggunakan adalah teori pengambilan keputusan (*decision making theory*) yang dikemukakan oleh Snyder. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan beberapa faktor internal dan eksternal dalam mengambil keputusan untuk menerapkan SPSK. Faktor internal muncul dari prioritas diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia, opini dan desakan publik, serta kondisi sosial dan ekonomi PMI yang rawan oleh tindakan TPPO. Sementara faktor eksternal muncul dari adanya regulasi dan tata kelola baru perlindungan pekerja migran di Arab Saudi, budaya perbudakan dan kafalah yang merugikan PMI, serta reformasi sistem kafalah di Negara Teluk lainnya yaitu Qatar. Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa perubahan antara sistem penempatan PMI melalui kafalah dan SPSK merupakan langkah progresif dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk melindungi para pekerja migran.

Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Sistem Penempatan Satu Kanal, Indonesia, Arab Saudi.

ABSTRACT

This study aims to analyze factors that led the decision of the Government of Indonesia to implement One Channel Placement System (SPSK) as a new placement program of Indonesian Migrant Worker (PMI) in Saudi Arabia. The background of this study is based on the high number of PMI working in Saudi Arabia amidst the problems faced by PMI. One of the factors causing the problems faced by PMI is due to the implementation of the kafalah system in Saudi Arabia which is exploitative. Through the SPSK Program, the Indonesian Government is trying to create a PMI placement program in Saudi Arabia that is integrated online and hence safer. The theory used in this study is the decision-making theory by Snyder. This research finds that the Indonesian Government considers several internal and external factors in making the decision to implement SPSK. Internal factors arise from the priority of the Indonesian Government's protection diplomacy, public opinion and pressure, and the social and economic conditions of migrant workers who are vulnerable to TPPO. Meanwhile, external factors arise from the existence of new regulations and governance for the protection of migrant workers in Saudi Arabia, the permanent and kafalah culture that is detrimental to migrant workers, and the reform of the kafalah system in another Gulf country, namely Qatar. From this study, it can be seen that the change between the PMI placement system through kafalah and SPSK is a progressive step by the Indonesian and Saudi Arabian governments to protect migrant workers.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, One Channel Placement System, Indonesia, Saudi Arabia.